

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi di tingkat desa merupakan fokus penting pemerintah untuk mendorong pemerataan hasil pembangunan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama ini, desa kerap dipersepsikan tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah perkotaan, baik dalam aspek ketersediaan infrastruktur maupun kondisi ekonomi warganya. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum utama dalam memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Salah satu wujud nyata dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana penguatan ekonomi desa. Melalui BUMDes, desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, memberdayakan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka peluang kerja, serta mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Secara nasional, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2023 jumlah BUMDes di Indonesia telah melampaui 60.000 unit yang tersebar di berbagai daerah. Peningkatan jumlah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Namun demikian, pertumbuhan BUMDes dari sisi kuantitas belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja. Masih banyak BUMDes yang belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain lemahnya kemampuan manajerial, terbatasnya akses permodalan, sistem pengelolaan keuangan yang belum berjalan secara efektif, serta pemanfaatan aset desa yang belum maksimal. Dengan demikian, permasalahan utama BUMDes tidak hanya

berkaitan dengan jumlah yang terus meningkat, tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas pengelolaan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Pada tingkat provinsi, Riau termasuk salah satu daerah dengan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang relatif besar, yaitu lebih dari 1.800 unit. Keberadaan BUMDes tersebut membuka peluang yang luas bagi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal, mengingat karakteristik desa di Riau yang memiliki sumber daya beragam, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Provinsi Riau masih berada pada kategori dasar dan berkembang, sementara BUMDes yang telah mencapai kategori maju jumlahnya relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama masih terletak pada aspek tata kelola dan pengelolaan usaha. Menurut penelitian Aulia et al., (2024) mengungkapkan bahwa meskipun penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes di Riau secara umum tergolong baik, masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan manajemen usaha yang berdampak pada belum optimalnya kinerja BUMDes. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis menempati peringkat tertinggi dalam penerapan GCG dengan kategori sangat baik dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau, yang mencerminkan adanya dukungan kelembagaan BUMDes yang relatif lebih kuat di wilayah tersebut (Aulia et al., 2024).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang menunjukkan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang cukup pesat. Didukung oleh struktur perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta usaha mikro, BUMDes di Kabupaten Bengkalis memiliki potensi strategis untuk berperan sebagai penggerak perekonomian desa. Namun demikian, seperti halnya di daerah lain, BUMDes di Bengkalis masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain terbatasnya akses permodalan, lemahnya sistem pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi dan aset BUMDes, yang pada akhirnya menghambat peningkatan pendapatan BUMDes.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis cenderung terkonsentrasi pada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkalis memiliki 28 BUMDes, sedangkan Kecamatan Bantan sebanyak 23 BUMDes, sehingga secara keseluruhan berjumlah 51 BUMDes. Seluruh BUMDes tersebut berada pada desa dengan status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengindikasikan tingkat kemandirian desa yang relatif tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja pendapatan BUMDes. Sebagian BUMDes di kedua kecamatan masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan usaha, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan BUMDes belum optimal. Pada tabel 1.1 berikut ini adalah nama-nama BUMDes dan nama desa dari kedua kecamatan bengkalis yaitu :

Tabel 1.1 Nama BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Bantan

No	Nama Bumdes	Nama Desa	Kecamatan	Status IDM
1	Setiapati	Kelapapati	Bengkalis	Mandiri
2	Halwah	Pedekek	Bengkalis	Mandiri
3	Pangkalan Batang Jaya	Pangkalan Batang	Bengkalis	Mandiri
4	Sebauk Gemilang	Sebauk	Bengkalis	Mandiri
5	Langgam Sako	Teluk Latak	Bengkalis	Mandiri
6	Karya Mandiri Jaya	Meskom	Bengkalis	Mandiri
7	Dara Sembilan	Senggoro	Bengkalis	Mandiri
8	Air Putih Jaya	Air Putih	Bengkalis	Mandiri
9	Bathin Alam	Sungai Alam	Bengkalis	Mandiri
10	Insan Madani	Penampi	Bengkalis	Mandiri
11	Murni Alami	Temeran	Bengkalis	Mandiri
12	Karya Bathin Bersama	Penebal	Bengkalis	Mandiri
13	Usaha Bersama	Pematang Duku	Bengkalis	Mandiri
14	Lestari	Ketam Putih	Bengkalis	Mandiri
15	Anugrah	Kelemantan	Bengkalis	Mandiri
16	Harapan Bersama	Sekodi	Bengkalis	Mandiri
17	Unggul Sari	Wonosari	Bengkalis	Mandiri
18	Kuala Alam Bandar Jaya	Kuala Alam	Bengkalis	Mandiri
19	Amanah Jaya	Kelebuk	Bengkalis	Mandiri

No	Nama Bumdes	Nama Desa	Kecamatan	Status IDM
20	Sejahtera Bersama	Palkun	Bengkalis	Mandiri
21	Menara Sb	Sungai Batang	Bengkalis	Mandiri
22	Mekar Perepat Jati	Perapat Tunggal	Bengkalis	Mandiri
23	Fajar Harapan	Simpang Ayam	Bengkalis	Mandiri
24	Bathin	Senderak	Bengkalis	Mandiri
25	Maju Bersama	Kelemantan Barat	Bengkalis	Mandiri
26	Mahkota Damai	Damai	Bengkalis	Mandiri
27	Karya Bakti Bersama	Pangkalan Batang Barat	Bengkalis	Mandiri
28	Amanah Jaya	Pematang Duku Timur	Bengkalis	Mandiri
29	Pratama Bantan Sejahtera	Bantan Tengah	Bantan	Mandiri
30	Karya Mandiri	Bantan Air	Bantan	Mandiri
31	Payung Harapan	Bantan Tua	Bantan	Mandiri
32	Gadling Emas	Teluk Pambang	Bantan	Mandiri
33	Tuah Baru	Selat Baru	Bantan	Mandiri
34	Sumber Rezeki	Teluk Lancar	Bantan	Mandiri
35	Sukses Karya Bersama	Kembung Luar	Bantan	Mandiri
36	Sejahtera Jangkang	Jangkang	Bantan	Mandiri
37	Sejahtera Muntai	Muntai	Bantan	Mandiri
38	Mulia Jaya Abadi	Resam Lapis	Bantan	Mandiri
39	Mutia Mandiri	Berancah	Bantan	Mandiri
40	Maju Bersama	Ulu Pulau	Bantan	Mandiri
41	Artomoro	Mentayan	Bantan	Mandiri
42	Mitra Usaha Berpadu	Pambang Pesisir	Bantan	Mandiri
43	Restu Bersama	Sukajadi	Bantan	Mandiri
44	Mandiri Sejahtera	Pambang Baru	Bantan	Mandiri
45	Sepakat Makmur	Kembung Baru	Bantan	Mandiri
46	Pasir Bulan	Pasiran	Bantan	Mandiri
47	Sumber Rezeki	Bantan Sari	Bantan	Mandiri
48	Bantan Berkah Bersama	Bantan Timur	Bantan	Mandiri
49	Sumber Rezeki Teluk Papal	Teluk Papal	Bantan	Mandiri
50	Bina Citra Mandiri	Muntai Barat	Bantan	Mandiri
51	Gerbang Lestari	Deluk	Bantan	Mandiri

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 51 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, masing-masing sebanyak 28 BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan 23 BUMDes di Kecamatan Bantan. Seluruh BUMDes tersebut berada pada desa dengan status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan bahwa desa-desa tersebut telah memiliki kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang relatif memadai untuk menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes di wilayah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Namun demikian, pencapaian status desa mandiri tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja pendapatan BUMDes. Sebagian besar BUMDes di kedua kecamatan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan yang masih bergantung pada dana desa dan bantuan pemerintah, sistem pengelolaan keuangan yang belum berjalan secara transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan BUMDes sebagai entitas usaha yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua BUMDes mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap PADes masih relatif rendah meskipun jumlah BUMDes tergolong cukup besar.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa sebagian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih mengalami stagnasi, bahkan belum beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan, lemahnya sistem pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan BUMDes sebagai entitas usaha desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang mampu menunjukkan kinerja positif dan layak dijadikan contoh praktik baik. Salah satu di antaranya adalah BUMDes Sejahtera Jangkang di Kecamatan Bantan, yang berhasil mengoptimalkan pengelolaan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam periode 2019-2023, BUMDes ini secara konsisten menyumbang PADes dengan nilai tertinggi di Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan tersebut didukung oleh pengelolaan beberapa

unit usaha, meliputi usaha simpan pinjam, produksi air minum kemasan Seribu Akar, serta jasa penyewaan tenda dan kursi. Capaian tersebut memperoleh apresiasi dari pemerintah desa maupun Pemerintah Kecamatan Bantan sebagai bukti peran strategis BUMDes dalam mendorong perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, 2024).

Selain itu, inovasi pengelolaan usaha desa juga ditunjukkan oleh BUMDes Kuala Alam di Kecamatan Bengkalis. Pada awal tahun 2025, BUMDes ini mengembangkan usaha di sektor pertanian melalui budidaya semangka dengan menanam sekitar 3.000 bibit pada lahan seluas setengah hektare. Kegiatan tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 15 ton semangka untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di Pulau Bengkalis. Strategi penanaman dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan periode permintaan tinggi, seperti menjelang Ramadan, selama Ramadan, dan saat Idulfitri. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan lokal, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat desa (KBRN Bengkalis, 2025).

Inovasi pengelolaan usaha desa juga ditunjukkan oleh BUMDes Pangkalan Batang Barat yang pada periode 2024-2025 mengembangkan unit usaha di sektor peternakan ayam pedaging. Kegiatan usaha ini diawali dengan pemeliharaan sekitar 1.300 ekor ayam ras, dengan tingkat kesiapan panen mencapai 1.253 ekor yang dilakukan secara berkala setiap 30 hari. Hasil produksi dipasarkan kepada masyarakat setempat, termasuk melalui kerja sama dengan pondok pesantren yang mampu menyerap sekitar 800 kilogram ayam per bulan. Dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menjadikan unit usaha ini sebagai salah satu contoh pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal yang berkelanjutan (Mediacenter Riau, 2025).

Meskipun terdapat beberapa contoh keberhasilan BUMDes, kondisi umum menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Berbagai kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan permodalan, lemahnya sistem pengelolaan keuangan, serta rendahnya tingkat pemanfaatan aset desa, yang berdampak pada terbatasnya kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan BUMDes, khususnya di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Akses permodalan merupakan salah satu determinan penting dalam pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian yang dilakukan oleh Putu et al., (2024) menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produktivitas BUMDes di Kabupaten Tabanan. Meskipun pengaruh langsung modal terhadap pendapatan BUMDes tidak signifikan, modal terbukti memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui peningkatan produktivitas usaha. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Kurnia et al., (2023) pada sektor pertanian kelapa sawit di Nagari Ophir, yang menyimpulkan bahwa akses modal memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pendapatan petani. Perbedaan hasil penelitian ini diduga dipengaruhi oleh karakteristik jenis usaha dan pola perolehan pendapatan yang berbeda. Kendati demikian, secara umum keterbatasan akses permodalan tetap menjadi permasalahan yang relevan, karena rendahnya dukungan modal berpotensi menurunkan daya saing serta menghambat pengembangan dan diversifikasi usaha BUMDes, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian pendapatan (Miamithadewi & Purwanti, 2024).

Selain aspek permodalan, pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian Fatihin, (2023) di Desa Lando, Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan bahwa pengelolaan dana BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa, dengan kontribusi sebesar 59,1%. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nurjanah & Dewi, (2023) di Bogor yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam konteks pengelolaan usaha modern, efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditunjang oleh pemanfaatan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*). Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, seperti Buku Warung, Jurnal, maupun *Microsoft Excel*, mampu meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, menyajikan

informasi keuangan yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan usaha yang lebih tepat Nurjanah & Dewi, (2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pencatatan keuangan yang baik yang kini dapat diotomatisasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes serta membangun kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Utami, (2024) di Desa Wonorejo menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan BUMDes, serta kinerja pemerintah desa secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan kontribusi sebesar 80,7%. Temuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan aset desa yang efektif, mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan pendapatan desa. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PADes tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan aset desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aset serta kemampuan mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi desa, khususnya BUMDes.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Handayani & Nugraha, (2023) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dan optimalisasi BUMDes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Meskipun secara parsial profesionalisme aparatur desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun ketika diuji secara simultan bersama variabel lainnya, seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PADes. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan pendapatan desa sangat ditentukan oleh sinergi antara tata kelola aset desa yang baik, optimalisasi peran BUMDes, serta kinerja dan koordinasi pemerintah desa.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial dan dilakukan di luar wilayah Provinsi Riau. Penelitian Miamithadewi & Purwanti, (2024), misalnya, lebih menitikberatkan pada pengaruh permodalan terhadap produktivitas BUMDes di Kabupaten

Tabanan, sedangkan penelitian Fatihin, (2023) serta Nurjanah & Dewi, (2023) berfokus pada aspek pengelolaan keuangan. Sementara itu, Handayani & Nugraha, (2023) mengkaji pengelolaan aset desa dan optimalisasi BUMDes yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa permodalan, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan aset desa memiliki peran penting dalam kinerja ekonomi desa. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang menguji ketiga faktor tersebut secara simultan dalam konteks BUMDes, khususnya di Provinsi Riau.

Selain keterbatasan pada pendekatan penelitian, sebagian besar studi terdahulu berlokasi di wilayah Bali, Lombok, dan Jawa, sementara kajian mengenai BUMDes di Provinsi Riau terutama di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan masih relatif minim. Padahal, wilayah tersebut memiliki jumlah BUMDes yang cukup besar serta potensi ekonomi desa yang tinggi. Namun, realisasi pendapatan BUMDes belum optimal, dengan sekitar 40% BUMDes dilaporkan belum menghasilkan laba yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendirian BUMDes dan capaian kinerjanya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses permodalan, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan BUMDes terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian mengenai manajemen BUMDes, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akses modal berpengaruh Positif terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Bantan?
2. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh Positif terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Bantan?

3. Apakah optimalisasi pemanfaatan BUMDes berpengaruh Positif terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Bantan?
4. Apakah akses modal, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan BUMDes secara simultan berpengaruh Positif terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Bantan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oleh karena itu, BUMDes yang berada di kecamatan lain tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Penetapan batasan wilayah tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus pada faktor-faktor internal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akses modal terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
3. Untuk mengetahui pengaruh optimalisasi pemanfaatan BUMDes terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
4. Untuk menganalisis pengaruh akses modal, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan BUMDes secara simultan terhadap pendapatan BUMDes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan akses modal, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman praktis dalam melaksanakan penelitian lapangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan teoritis bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan BUMDes, akses permodalan, dan pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi literatur ilmiah di lingkungan kampus, khususnya dalam bidang tata kelola BUMDes, pengembangan ekonomi desa, dan pengelolaan keuangan berbasis desa. Hal ini juga dapat memperkaya bahan ajar serta menjadi bahan diskusi akademik di kemudian hari.

4. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penguatan peran BUMDes, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan BUMDes guna meningkatkan pendapatan desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris yang mendukung kebijakan pembangunan desa berbasis ekonomi lokal.